

Renja Tahun 2020

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, Juni 2019

**KEPALA PELAKSANA,**
Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	57
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	67
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	71
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	81
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	83
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	83
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	87
3.3 Program dan Kegiatan.....	89
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	101
BAB V PENUTUP.....	107

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- Tabel 4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
- Tabel 5 : Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2020
- Tabel 6 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Renja BPBD Tahun 2020
- Tabel 7 : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

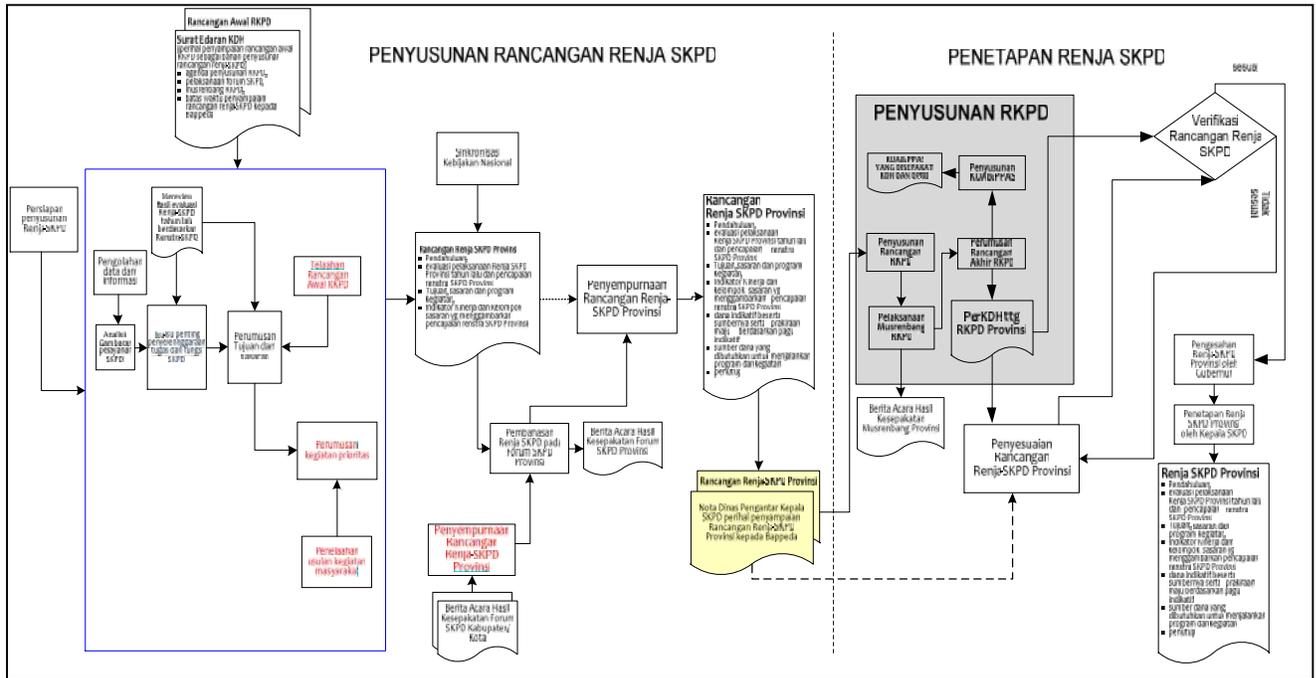
Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2020.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2016-2021.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal

mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2020 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.

5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 s.d Tahun berjalan(*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2019
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2019 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target Renja SKPD 2018 (n-2)	Realisasi Renja SKPD 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
1	WAJIB										
1	05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi						

1	05	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1700 surat	0 Surat	0 surat	0 surat	#DIV/0! %	0 surat	0 surat	0 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	300 rekening	120 Rekening	60 rekening	60 rekening	100 %	60 rekening	240 rekening	80 %	
1	05	02	01		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan	5 orang	5 orang	0 orang	0 orang	0 %	- org	5 orang	100 %	
1	05	02	01	06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 org	1 orang	100 %	
1	05	02	01	07	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	456 unit	97 unit	64 unit	36 unit	56 %	107 unit	240 unit	53 %	
1	05	02	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	50 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	0 surat	0 surat	0 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	01	09	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	0 surat	0 surat	0 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	01	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	
1	05	02	01	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000 kotak	0 kotak	0 kotak	0 kotak	#DIV/0! %	0 kotak	0 kotak	0 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2018

1	05	02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 ekplr	120 expl	60 expl	58 expl	96.67 %	60 expl	238 expl	66 %	
1	05	02	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	#DIV/0! %	0 surat	0 surat	0 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2018
1	05	02	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang ikuti/dilaksanakan (kali)	191 kali	123 kali	37 kali	63 kali	170 %	34 kali	220 Kali	115 %	
1	05	02	01	19	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	52 orang	50 orang	3 orang	1 orang	33.33 %	4 org	49 orang	94 %	
1	05	02	01	21	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	20 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	16 dok	80 %	
1	05	02	01	22	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 Jenis	100 %	8 jenis	8 jenis	100 %	
1	05	02	01	23	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	649 kali	178 kali	132 kali	148 Kali	112.12 %	209 Kali	535 Kali	82 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2017
1	05	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi									

1	05	02	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 unit	1 unit	1 unit	1 Unit	100 %	0 unit	2 unit	100 %	
1	05	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	10 unit	5 unit	0 unit	0 Unit	- %	3 unit	8 unit	80 %	
1	05	02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	11 unit	0 unit	4 unit	4 Unit	100.00 %	2 unit	6 unit	55 %	
1	05	02	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	128 unit	47 unit	25 unit	25 Unit	100 %	21 unit	93 unit	73 %	
1	05	02	02	13	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	- unit	- %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	10 unit	2 unit	4 unit	4 unit	100 %	2 unit	8 unit	80 %	
1	05	02	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 unit	3 unit	10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	67 %	
1	05	02	02	57	Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah pagar kantor yang dibangun	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	1 unit	1 unit	100 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan pakaian hari-hari tertentu									

1	05	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	49 psg/org	23 psg/org	0 psg/org	0 psg/org	#DIV/0! %	- psg/org	23 psg/org	47 %	
1	05	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	102 psg/org	0 psg/org	32 psg/org	32 psg/org	100.00 %	- psg/org	32 psg/org	31 %	
1	05	02	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya									
1	05	02	04	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur/upah jasa yang mengikuti pelatihan, bimtek dan diklat (orang)	50 orang	29 orang	10 org	13 org	130 %	10 org	52 orang	104 %	
1	05	02	05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu									
1	05	02	05	06	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	3 dok	75 %	
1	05	02	05	08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	6 dok	0 dok	0 dok	0 dok	#DIV/0! %	3 dok	3 dok	50 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	06		Program perencanaan dan penganggaran SKPD	persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu									

1	05	02	06	01	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	18 dok	0 dok	6 dok	6 dok	100.00 %	6 dok	12 dok	67 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2018
1	05	02	60		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi									
1	05	02	60	06	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %	
1	05	02	60	07	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100 %	2 unit	5 unit	100 %	
1	05	02	60	08	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	2 unit	4 unit	67 %	
1	05	02	60		Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah pengaman sungai yang dibangun	8 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100 %	- unit	8 unit	100 %	Kegiatan ini Dana Hibah tahun 2018
1	05	02	60	10	Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90 %	90 %	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %	100 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2018

1	05	02	60		Perbaikan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana yang diperbaiki	10 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	- unit	- %	
1	05	02	60	13	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	1 unit	1 unit	50 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2019
1	05	02	23		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase meningkatnya upaya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran									
1	05	02	23	01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran (KP.1)	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang diadakan	93 unit	93 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	93 unit	100 %	Tahun 2017, Kegiatan untuk Pemadam
1	05	02	23	02	Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Tersedianya operasional kesiapsiagaan Satgas Damkar	12 bulan	12 bulan	0 bulan	0 bulan	#DIV/0! %	- bulan	12 bulan	100 %	m Kebakaran telah beralih ke OPD baru
1	05	02	23		Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan risiko bencana									
1	05	02	23	01	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Tersedianya pembayaran retensi pos damkar	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100 %	- paket	3 paket	100 %	

1	05	02	23	06	Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0 %	1 Dokumen	2 Dokumen	100 %	
1	05	02	23	07	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	600 orang	297 orang	300 orang	297 orang	99 %	- org	594 orang	99 %	Kegiatan ini baru dianggarkan pada tahun 2017
1	05	02	23	08	Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	500 orang	0 orang	250 orang	240 orang	96 %	- org	240 org	48 %	
1	05	02	23	09	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	500 orang	0 orang	250 orang	236 orang	94.4 %	- org	236 org	47 %	
1	05	02	23	10	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	200 unit	70 unit	126 unit	31 unit	24.60 %	- unit	101 unit	51 %	
1	05	02	23	11	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	3 kali	0 Kali	1 kali	1 kali	100 %	- Kali	1 Kali	33 %	Tahun 2017 Apel Siaga Bencana tidak terlaksana

1	05	02	23	12	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali	0 Kali	1 kali	1 kali	100 %	- kali	1 kali	50 %	Tahun 2017 Simulasi Penanggulangan Bencana tidak terlaksana
1	05	02	23	13	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	100 orang	0 orang	50 orang	50 orang	100 %	- org	50 org	50 %	Tahun 2017 keg. ini tidak terlaksana
1	05	02	53		Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender									
1	05	02	53	01	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 Kejadian	25 Kejadian	10 Kejadian	25 Kejadian	250 %	10 Kejadian	60 Kejadian	120 %	
1	05	02	53	02	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	50 Kejadian	27 Kejadian	10 Kejadian	5 Kejadian	50 %	10 Kejadian	42 Kejadian	84 %	
1	05	02	53	03	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	25 Kejadian	6 Kejadian	4 Kejadian	2 Kejadian	50 %	5 Kejadian	13 Kejadian	52 %	
1	05	02	53	04	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	30 orang	8 orang	20 orang	19 orang	95 %	30 org	19 org	63 %	

1	05	02	62		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana													Program ini baru dianggarkan tahun 2019			
1	05	02	62	01	Pemetaan Potensi Ancaman Bencana	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun	1	Dokumen	0	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	#DIV/0!	%	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%
1	05	02	62	02	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	300	orang	0	orang	-	orang	-	orang	#DIV/0!	%	150	org	150	orang	50	%
1	05	02	62	03	Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	300	orang	0	orang	-	orang	-	orang	#DIV/0!	%	150	org	150	org	50	%
1	05	02	62	04	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	300	orang	0	orang	-	orang	-	orang	#DIV/0!	%	150	org	150	org	50	%
1	05	02	62	05	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	158	unit	0	unit	-	unit	-	unit	#DIV/0!	%	78	unit	78	unit	49	%
1	05	02	62	06	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	4	kali	0	Kali	-	kali	-	kali	#DIV/0!	%	1	Kali	1	Kali	25	%

1	05	02	62	07	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	4 kali	0 Kali	- kali	- kali	#DIV/0! %	1 kali	1 kali	25 %
1	05	02	62	08	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	100 orang	0 orang	- orang	- orang	#DIV/0! %	50 org	50 org	50 %
1	05	02	24		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana								
1	05	02	24	01	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	1 kali	1 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0! %	- kali	1 Kali	100 %
1	05	02	27		Program Kesiapsiagaan	Persentase peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana								
1	05	02	27	03	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	1 kali	1 Kali	0 kali	0 Kali	#DIV/0! %	- kali	1 Kali	100 %
1	05	02	28		Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Persentase tim relawan BPBD yang ditingkatkan kapasitasnya								
1	05	02	28	01	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah tim relawan laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	102 orang	102 orang	0 org	0 org	#DIV/0! %	- org	102 orang	100 %
1	05	02	31		Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun								

1	05	02	31	01	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	1 unit	100 %	
1	05	02	32		Program Pengendalian Banjir	Persentase sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun							-		
1	05	02	32	01	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun (penyusunan DED)	1 Dok	1 Dok	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	- unit	1 Dok	100 %	Yang terealisasi hanya Penyusunan DED 1 Dokumen

❖ **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018**

Pada tahun 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 3 (tiga) program utama dengan 17 (tujuh belas) kegiatan serta 6 (enam) program pendukung dengan 19 (sembilan belas) kegiatan. Realisasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 9.415.274.643,- atau sebesar 96,09% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.117.093.343,- atau sebesar 97,22% dari total anggaran yang telah disediakan. Realisasi Keuangan Rata-rata dari pelaksanaan 9 program dan 36 Kegiatan adalah sebesar 96,30%, adapun analisis pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang bersumber dari APBN (BNPB) dan APBD. Dan selain itu juga untuk memfasilitasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pasca bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini sifatnya disediakan untuk mengakomodir pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik dan hanya dapat digunakan bilamana terjadi bencana. Anggaran pada program/kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kejadian bencana. Pada Pada tahun 2018 program kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan yaitu :

➤ **Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana**

Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 75,86% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 15.272.900,- yang terdiri dari belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam daerah. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi kejadian pasca bencana. Adapun hasil identifikasi dan verifikasi pada tahun 2018 yaitu :

- Identifikasi rumah roboh di Desa Soroako Kec. Nuha
- Identifikasi saluran irigasi yang rubuh di Desa Kawata Kec. Wasuponda

- Identifikasi tanggul penahan tebing yang rusak di Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena
- Identifikasi longsor Desa Maliwowo Kec. Angkona
- Identifikasi rencana normalisasi saluran pembuang di Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur
- Identifikasi rencana pembuatan talud Sungai Singgeni Desa Kaltiri Kec. Burau
- Identifikasi runtuhnya tebing sungai Lepa-Lepa Desa Burau Kec. Burau
- Identifikasi banjir di desa Lagego dan Burau pantai Kec. Burau
- Identifikasi banjir Sungai Singgeni Desa Kalatiri Kec. Burau
- Identifikasi tanah longsor di Desa Baruga dan Kelurahan Malili Kec. Malili
- Identifikasi rumah rusak berat akibat gempa bumi di desa Puncak Indah
- Identifikasi runtuhnya dinding sungai Lembo (belakang Pustu Dsn. Rindo-Rindo Desa Margolembo Kec. Mangkutana)
- Identifikasi terkait rencana normalisasi sungai Tokke dan runtuhnya jembatan di Desa Mantadulu Kec. Angkona
- Identifikasi runtuhnya dinding sungai Lepa-Lepa di Desa Burau Kec. Burau
- Identifikasi runtuhnya dinding sungai di Desa Langkea Raya Kec. Towuti

➤ **Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana**

Target *output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun sebanyak 1 unit dan terealisasi 100% dengan serapan anggaran 100%. Pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

- Normalisasi saluran pembuang Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur (P = 4.690 m, Proteksi Pasangan Batu P = 46.50 m).

- **Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi sebanyak 1 unit dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,96% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 153.700,-. Sisa anggaran tersebut adalah sisa administrasi proyek. Pekerjaan fisik yang dilaksanakan yaitu :
 - Pekerjaan Talud Sungai Singgeni Desa Kalatiri Kec. Burau (Pasangan Talud Batu P = 127 m) :
- **Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**
Target *output* kegiatan adalah terbangunnya pengaman sungai yang terbangun sebanyak 4 terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,99% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 731.549.50,-. Sisa anggaran merupakan sisa tender dan dikembalikan ke kas negara karena merupakan dana hibah. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan yaitu
 - Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili (pasangan Turap besi WF P=356 m dan Talud Proteksi P=17,16 m3)
 - Penguatan Tebing Sungai Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana (Pasangan Turap Besi WF P=208 m)
 - Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Dusun Korondeme Desa Koroncia Kec. Mangkutana (Pasangan Talud Proteksi P=230 m)
 - Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Pongkeru Kec. Malili (pasangan Turap besi WF P=175.8 m dan Talud Proteksi P=95 m)
- **Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**
Target *output* kegiatan adalah Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar 90% terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 92,47% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 7.148.877,-. Sisa anggaran terdiri dari belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan non APBD yang ada dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Penggunaan anggaran

disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan non APBD yang ada dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2 Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Program ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana baik itu banjir, longsor, angin beliung dan kebakaran. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan :

➤ **Pemetaan Potensi Ancaman Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan sebaran-sebaran ancaman bencana yang ada, kondisi kerentanan dan kapasitas aset penghidupan dan kehidupan masyarakat di daerah-daerah rawan bencana. Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen pemetaan ancaman bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%). Adapun dokumen yang disusun yaitu Dokumen Pemetaan Tanah Longsor Desa Maliwowo Kec. Angkona.

➤ **Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pemberian informasi terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta mengurangi dampak/risiko akibat bencana. Target *output* kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebanyak 300 orang dan terealisasi sebanyak 297 orang (99%). Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Malili dan Kecamatan Tomoni. Pesertanya berasal dari 11 kecamatan dan terdiri dari Tim Relawan dan masyarakat. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,65% disebabkan karena jumlah peserta yang hadir kurang dari target yang direncanakan sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangannya.

➤ **Pelatihan tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Kita ketahui bahwa Kab. Luwu Timur berada pada iklim peralihan sehingga cuaca/iklim tidak dapat diprediksi, sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terkait hal tersebut sehingga dapat meminimalisir korban jiwa jika terjadi bencana.

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana serta adaptasi perubahan iklim sebanyak 250 orang dan yang hadir hanya 240 orang dengan realisasi keuangan sebesar 87,03%. Realisasi yang kurang dari 100% disebabkan karena jumlah peserta yang hadir kurang dari target sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dalam hal ini terkait biaya akomodasi, makanan dan minuman untuk peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Tomoni Timur, dan pesertanya berasal dari 11 kecamatan dan terdiri dari Tim Relawan dan Masyarakat.

➤ **Sosialisasi Daerah Rawan Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana sebanyak 250 orang dan terealisasi sebanyak 236 orang. Adapun realisasi keuangannya hanya 92,92% disebabkan karena penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah peserta yang hadir, hal ini terkait dengan biaya transportasi peserta yang tidak dapat terealisasi dan selebihnya merupakan sisa belanja. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Malili dan pesertanya berasal dari 11 kecamatan.

➤ **Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Target *output* kegiatan adalah

pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebanyak 126 unit dan terealisasi 31 unit (24,60%). Kegiatan ini hanya menyerap anggaran sebesar 52,63% disebabkan karena terdapat 95 unit sarana prasarana penanggulangan bencana yang tidak terealisasi akibat harga barang melebihi dari pagu anggaran yang tersedia. Adapun sarana dan prasarana penanggulangan yang diadakan yaitu

- Pengadaan Kantung Jenazah 10 unit, Pelampung (Life Jacket/Rompi Busa)
- 20 unit dan Lampu Penerang (Lighting Tower) 1 unit

➤ **Apel Siaga Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinergitas seluruh instansi terkait untuk mempersiapkan Siaga Bencana. Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Apel siaga Bencana sebanyak 1 kali dan terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 100%. Apel Siaga Bencana yang dilaksanakan dirangkaikan dengan pelaksanaan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yaitu tanggal 26 April setiap tahunnya. Adapun OPD atau organisasi/lembaga yang terlibat didalamnya yaitu OPD Lingkup Kab.Luwu Timur, TNI, POLRI, PT. Vale Indonesia Tbk, TRC BPBD, Manggala Agni, TAGANA dan PMI Luwu Timur.

➤ **Simulasi Penanggulangan Bencana**

Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Simulasi Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kali dan terealisasi 100%. Pada kegiatan ini dilakukan efisiensi anggaran dengan melibatkan dunia usaha dalam hal ini PT. Vale Indonesia Tbk sehingga anggaran yang disediakan di DPA-SKPD BPBD tidak digunakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut difasilitasi oleh PT. Vale Tbk Indonesia yaitu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Tindak Darurat Bendungan Seri Larona. Simulasi yang dilaksanakan adalah simulasi bencana banjir. Adapun OPD atau organisasi/lembaga yang terlibat yaitu PT. Vale Tbk Indonesia, BPBD Kab. Luwu Timur, TNI/POLRI,

SAR, TRC, Petugas Damkar, PMI, TAGANA, OPD terkait Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur serta masyarakat Kec. Malili.

➤ **Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat**

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan, kesigapan, ketangkasan, sehingga tercipta tenaga yang handal dalam penanggulangan bencana. Target *output* kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat sebanyak 50 orang dan terealisasi 100% dengan serapan anggaran sebesar 93,36% dan menyisakan anggaran Rp. 3.719.000 yang merupakan sisa belanja yang terdiri dari sisa belanja cetak, sewa tempat/penginapan, sewa mobilitas darat dan belanja perjalanan dinas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kec. Malili dengan peserta terdiri dari TRC BPBD, Satpol PP dan Damkar, TAGANA, PMI Luwu Timur, SAR Malili, SAR Soroako dan SAR ligas. Adapun jenis pelatihan yang diberikan yaitu Teknik Penyelamatan di Ketinggian (Hard High Angle Rescue).

3. Program Kedaruratan dan Logistik

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap korban bencana berupa penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana. Pada tahun 2018, program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu :

➤ **Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 10 kejadian dan terealisasi 25 kejadian. Kejadian bencana yang terfasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu

- Bencana Banjir sebanyak 8 kali kejadian (Desa Non blok, Lanosi, Kalatiri, Terengge Timur, Tadulako, Bangun Karya, Manunggal dan Alam Buana, Lakawali dan Tampinna)
- Orang hilang sebanyak 8 kali kejadian (Desa Atue, Wewangriu dan Harapan)
- Kebakaran rumah sebanyak 7 kali kejadian (Wewangriu, Lamaeto, Harapan, Soroako, Mandiri dan Kawata)
- Tanah longsor sebanyak 2 kali kejadian (Ds Baruga dan Kelurahan Malili Kec, Malili dan Desa Maliwowo)

Dari 65 kejadian terdapat 25 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, selebihnya 30 kejadian tidak terhitung karena kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Pada dasarnya anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana.

➤ **Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya. Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya sebanyak 10 kejadian dan terealisasi sebanyak 5 kejadian (50%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 83.05% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 26.958.845,- yang terdiri atas belanja sandang, biaya paket pengiriman serta perjalanan dinas luar daerah. Hal tersebut merupakan bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dengan memaksimalkan ketersediaan/stok sandang pada gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur selain itu juga didukung oleh persediaan pangan dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. Sedangkan partisipasi atau bantuan dari dunia usaha serta masyarakat sangat membantu dalam

memenuhi kebutuhan sandang dan pangan untuk korban bencana. Dan untuk biaya sewa/pengiriman logistik juga difasilitasi oleh pusat (BNPB).

➤ **Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan Posko Darurat Bencana. Pembentukan Posko Darurat Bencana baru dapat dilakukan jika dalam Keadaan Darurat Bencana. Dalam kegiatan ini disediakan operasional Posko Darurat Bencana. Target *output* kegiatan adalah tertanganinya kejadian tanggap darurat sebanyak 4 kejadian dan terealisasi 2 kejadian (50%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 41,25% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 29.413.850,-. Yang terdiri dari belanja BBM/pelumas, belanja sewa penginapan, belanja makanan dan minuman tamu, belanja makanan dan minuman kegiatan serta perjalanan dinas. Serapan anggaran hanya sebesar 41,25%, hal ini disebabkan karena dari 56 kejadian bencana yang terjadi di tahun 2018, hanya 2 kejadian bencana yang memerlukan pembentukan Posko Darurat Bencana, dan selebihnya langsung ditangani melalui penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Dan pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.

➤ **Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat**

Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Tim Reaksi Cepat dalam penanggulangan bencana. Dengan berdasarkan Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat, maka menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Reaksi Cepat. Rekrutmen Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan pada Tahun 2016 dengan jumlah personil sampai dengan tahun 2018 sebanyak 19 orang (upah jasa). Namun pada dasarnya semua personil BPBD Kab. Luwu Timur juga termasuk dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas pokok yaitu pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi

cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana. Adapun fungsi TRC dalam penanggulangan bencana yaitu :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat
2. Membantu BPBD Kabupaten/Kota untuk :
 - Mengaktivasi Posko BPBD Kabupaten/Kota
 - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana
 - Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada SATLAK BPBD Kabupaten/Kota yang terdiri :
 - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
 - Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil khusus)
 - Laporan lengkap/akhir penugasan

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat sebanyak 20 orang dan terealisasi 19 orang (95%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 91,20% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 26.003.550,-. Hal ini disebabkan karena adanya 1 orang personil TRC yang mengundurkan diri sehingga anggaran yang disediakan berupa honor dan makan minum harian tidak terealisasi.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah guna peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2018, program ini dilaksanakan melalui 11 kegiatan yaitu :

➤ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyelenggaraan pembayaran biaya listrik, telepon dan air kantor dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah rekening sebanyak 5, dari target *output* kegiatan adalah 60 rekening (listrik 24 rekening, telepon 12

rekening dan air 24 rekening) selama 12 bulan, sehingga realisasi fisik 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran 85,51% dari pagu dengan menyisakan anggaran senilai Rp.6.380.679,-. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pemakaian. Pembayaran listrik dan air kantor sifatnya fluktuatif disesuaikan dengan jumlah pemakaian. Dan biaya telepon yang semula perhitungan pembayarannya Rp. 170.000,-/bulan menurun dan bahkan kurang dari Rp. 100.000 /bulan.

➤ **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan sebanyak 1 orang dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 15.314.000,- (89,62%). Selain jasa tenaga kebersihan, kegiatan ini juga memfasilitasi kebutuhan alat dan bahan pembersih seperti Sapu ijuk, Sapu lidi, Sabun Cair, Pengharum Ruangan, Pengharum Kamar Mandi, Alat Pembersih Lantai, Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, Kaset Kaki, Sendok Sampah, Gunting Rumput, Tempat Sampah Besar, Pisau Mesin Babat, Kemoceng dan Keranjang Sampah Kecil. Pada kegiatan ini, penggunaan anggaran untuk penyediaan alat dan bahan pembersih disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan pembayaran honor untuk 1 orang tenaga kebersihan terealisasi sampai 12 bulan.

➤ **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan peralatan kerja agar dapat berfungsi dengan baik. Target *output* kegiatan adalah tersedianya pembayaran untuk perbaikan peralatan kerja sebanyak 64 unit dan terealisasi sebanyak 36 unit (56,25%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 63,13% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 9.751.000,-. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peralatan yang disediakan biaya perbaikannya namun tidak digunakan karena kondisi peralatan tersebut masih baik. Disamping itu terdapat peralatan seperti tabung alat selam yang pengisiannya difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Pangan sehingga terdapat

efisiensi anggaran. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan pada tahun 2018 yaitu Adapun jenis peralatan yang mengalami perbaikan yaitu Cuci AC 6 unit sebanyak 2 kali, Isi Freon 1 unit, Pergantian AS mesin babat 1 unit, Perbaikan rantai perahu karet 1 unit (dico/cat), instal laptop 2 unit dan service printer 3 unit, Cuci AC 1 unit, instal CPU 2 unit (instal office), Perbaikan chainsaw 1 unit, Pembelian batterai laptop 2 unit, Instal CPU 2 unit, service printer 2 unit, bongkar/pasang AC 6 unit, perbaikan Genset 1 unit. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kondisi peralatan, sehingga hanya digunakan apabila terdapat peralatan kerja yang perlu mendapat perbaikan.

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor. Target *output* kegiatan adalah tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 8 jenis dan terealisasi 100%. Adapun komponen alat listrik tersebut terdiri dari kabel, piiting, steker, balon lampu 20 watt, trafo lampu sorot, balon lampu sorot, capasitor, adaptor, ignitor. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,88%. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan minat baca serta meningkatkan pengetahuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target *output* kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kebar sebanyak 60 exemplar (surat kabar lokal 12 expl, surat kabar regional 36 expl dan surat kabar nasional 12 expl) dan terealisasi 58 expl (96,66%). Target yang tidak terpenuhi disebabkan karena terdapat Koran Lokal (Palopo Pos) yang baru memasukkan Koran pada Bulan Maret 2018 sehingga dari 12 expl yang direncanakan hanya terealisasi 10 expl. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,82%. Pembayaran bahan bacaan tersebut bersifat riil cost.

➤ **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD serta sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, propinsi dan kabupaten sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan ini menyerap anggaran 98.85% dari pagu dengan menyisakan anggaran senilai Rp. 2.675.210,-. Dari target *output* kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar provinsi sebanyak 37 kali dan terealisasi 63 kali (dalam provinsi 45 kali dan luar provinsi 18 kali). Capaian yang melebihi target disebabkan karena terdapat beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD. Sehingga anggaran yang disediakan bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan.

➤ **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan sebanyak 3 orang dan terealisasi hanya 1 orang (33,33%) yaitu tenaga administrasi. Kegiatan ini hanya menyerap anggaran sebesar 52,63% disebabkan karena terdapat 1 orang upah jasa sopir yang mengundurkan diri sedangkan rencana rekrutmen 1 orang upah jasa juga belum terealisasi sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan. Upah jasa yang terbayar honornya yaitu :

- Tenaga Administrasi 1 orang

➤ **Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD**

Tujuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kelancaran administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Target *output* kegiatan adalah terpenuhinya penunjang administrasi kesekretariatan SKPD sebanyak 8 jenis selama 12 bulan dan terealisasi 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar sebesar 76,05% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 21.026.550,-. Realisasi keuangan hanya sebesar 76,05%, disebabkan karena terdapat belanja makanan dan

minuman rapat yang dianggarkan untuk memfasilitasi penyusunan Perbub namun tidak terealisasi sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan serta pemakaian bbm operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun jenis penunjang tersebut yaitu :

- Belanja ATK
- Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Belanja BBM/Gas/Pelumas
- Belanja Jilid
- Belanja Cetak
- Belanja Penggandaan
- Belanja Makan dan Minum Rapat
- Belanja Makan dan Minum Tamu

➤ **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monev tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan sesuai dengan anggaran kas serta memonitoring kegiatan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini, mulai dari kunjungan kelokasi pasca bencana, bantuan bagi korban bencana dan sebagainya. Target *output* kegiatan adalah Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (100%), namun realisasi keuangan hanya sebesar 80,23% disebabkan karena beberapa kegiatan fisik pelaksanaan monitoringnya dibiayai melalui administrasi proyek pada kegiatan fisik yang dilaksanakan. Laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat terdiri :

- Formulir Evaluasi Renja Triwulanan
- Realisasi Anggaran Triwulanan
- Realisasi Fisik (Konstruksi) APBD Triwulanan
- Realisasi Fisik (Konstruksi) APBN Triwulanan

➤ **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 132 kali dan terealisasi 148 kali (112,12%) dengan realisasi keuangan hanya sebesar 76,43% Realisasi fisik yang lebih besar

dari realisasi keuangan disebabkan karena adanya efisiensi anggaran atas biaya transportasi yang dianggarkan untuk setiap orang, dimana beberapa kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional, hanya menggunakan biaya bbm saja sehingga realisasi perjalanan dinas dalam daerah melebihi dari target yang direncanakan.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan agar tercipta lingkungan kerja yang memadai serta ketersediaan peralatan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menyerap anggaran 93,86% dari pagu dengan menyisakan anggaran senilai Rp.48.312.443,-. Sisa anggaran tersebut sebagian adalah sisa kontrak/SPK dan sebagian lagi adalah sisa belanja dari kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. Pada tahun 2018, program tersebut dilaksanakan melalui 4 kegiatan yaitu :

➤ **Pembangunan Gedung Kantor**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang dibangun sebanyak 1 unit, dengan realisasi 1 unit (100%) dengan serapan anggaran 100%. Realisasi keuangan dapat tercapai karena sisa kontrak dari pekerjaan tersebut disesuaikan pada saat perubahan anggaran sehingga tidak ada SILPA.

➤ **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target *output* kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 25 unit dan teralisasi 100%. Dengan realisasi keuangan sebesar 98,55% dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.656.500,- adalah sisa kontrak/SPK. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan yaitu :

- Pengadaan Locker 2 Pintu 5 unit
- Pengadaan Komputer PC 1 unit
- Pengadaan Laptop 2 unit
- Pengadaan Printer 2 unit
- Pengadaan Kursi Rapat 12 unit
- Pengadaan Drone 1 unit

- Pengadaan Kamera Digital 1 unit
 - Pengadaan GPS 1 unit.
- **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**
- Target *output* kegiatan adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 4 unit dan terealisasi 4 unit (100%) namun realisasi keuangan hanya sebesar 70,88% Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.394.718 terdiri dari sisa SPK sewa angkut tangi air Rp 8.460.500, pengadaan pompa Rp. 10.000.000 dan sisa SPK pengadaan jaringan air bersih Rp 12.058.218 dan sisa SPK Instalasi listrik Rp 3.876.000 (pengadaan jaringan air bersih sudah inklud dengan pompa air sehingga belanja pengadaan pompa tidak direalisasikan). Adapun perlengkapan gedung kantor yang diadakan yaitu Jaringan Listrik 3 unit dan Jaringan Air 1 unit.
- **Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor**
- Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor 4 unit dan 4 unit (100%). Adapun gedung kantor yang dipelihara yaitu Gedung kantor BPBD 1 unit serta Pos Damkar 3 unit Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 84,33%. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi bangunan gedung kantor.
- **Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
- Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 10 unit dan terealisasi 100%. Adapun kendaraan dinas/operasional yang dipelihara yaitu kendaraan roda empat (doble cabin) 2 unit, kendaraan roda enam (truck serbaguna) 1 unit, kendaraan roda empat (mobil operasional TRC) 1 unit dan kendaraan roda dua 6 unit. Pemeliharaan kendaraan dinas terdiri dari pembelian suku cadang, oli/pelumas, biaya service dan pembayaran STNK. Realisasi keuangan hanya sebesar 90,54% dari pagu dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8.611.225,-. Sisa anggaran disebabkan karena belum terbayarnya STNK kendaraan roda dua dan roda empat 1 unit. Hal ini terkendala kendaraan tersebut merupakan bantuan pusat (BNPB) sehingga pembayaran STNK harus dilakukan di pusat (Jakarta).

6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

➤ Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Target *output* kegiatan adalah Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu (pakaian batik khas Luwu Timur) sebanyak 32 orang (22 PNS dan 11 orang upah jasa) dan terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

➤ Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Target *output* kegiatan adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 97,54%. Pada kegiatan ini dilakukan efisiensi anggaran dari pagu pokok Rp. 4.000.000,- namun yang digunakan hanya Rp. 2.360.000,- sehingga disesuaikan pada perubahan anggaran dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

8. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Target *output* kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%. Dokumen yang disusun yaitu Renstra Revisi, Renja Pokok 2019, Renja Perubahan 2018 dan RKA-P 2018 dan RKA 2019, DPA 2018, DPA-P Tahun 2018. Realisasi keuangan hanya sebesar 73,57% dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.501.500,- yang merupakan sisa belanja makan dan minum rapat, penggunaannya disesuaikan dengan rapat yang dilaksanakan

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

➤ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan sebanyak 10 orang dan

teralisasi 13 orang. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 75,64% dan menyisakan anggaran senilai Rp. 10.960.000,-. Anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaannya disesuaikan dengan undangan/pemanggilanpeserta. Adapun kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi yang diikuti pada tahun 2018 yaitu :

- Bimtek Penatausahaan Keuangan 2 orang
- Bimtek Barang Milik Daerah 1 orang, Pelatihan dan Sertifikasi Selam Scuba Diving 2 orang
- Pelatihan Dasar-Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana 4 orang
- Bimtek Peningkatan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Bencana Daerah 4 orang

❖ **Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2019**

Pagu Anggaran Tahun 2019 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu adalah sebesar Rp. 7.595.804.766,- yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.275.898.466,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.319.906.300,-. Adapun target pada Triwulan I TA. 2019 yaitu Rp 1.040.132.617,- dengan realisasi sebesar Rp. 569.842.304,- (54,79%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 568.974.617 dengan realisasi sebesar Rp 367.005.166,- (64,50%) dan Belanja Langsung Rp 471.158.000,- dengan realisasi Rp 202.837.138,-(43,05%). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 8 program dan 42 kegiatan. Adapun capaian dari program/kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada Triwulan I TA. 2019, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyerap anggaran sebesar Rp 7.554.300,- (7,99%) dari target Rp 94.592.250,-. Sedangkan Target kinerja program yaitu jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan pada Triwulan III TA. 2019

➤ **Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana**

Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen hasil identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana sebanyak 1 dokumen dan disusun setiap triwulan dan terealisasi 1 dokumen. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 7.554.300,- (7,99%). Adapun hasil identifikasi pada triwulan I TA. 2019 yaitu :

- Identifikasi kerusakan jalan dan jembatan di Trans SP1 KSP Mahalona Kec. Towuti
- Identifikasi korban angin puting beliung di Dsn. Sejahtera Desa Lera Kec. Wotu
- Identifikasi korban angin puting beliung Dsn Rante Tuo Desa Manggala Kec. Mangkutana
- Identifikasi korban angin puting beliung di Dsn. Mekar Sari Desa Solo Kec. Angkona
- Peninjauan lokasi rencana pembangunan rumah tetap korban longsor Desa Maliwowo Kec. Angkona
- Identifikasi tentang adanya penggerusan dan penyempitan aliran Sungai Asuli Desa Langkea Raya Kec. Towuti
- Peninjauan lokasi rencana pembangunan rumah tetap korban longsor Desa Watampunua Kec. Angkona dan Dsn. Salociu Desa Ussu Kec. Malili
- Identifikasi kejadian angin kencang di Dsn. Buapol Desa Karambua Kec. Wotu
- Identifikasi kejadian bencana angin kencang Dsn. Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur
- Peninjauan tentang adanya gejala longsor susulan tanggul penahan tebing Dsn Batu Merah Kelurahan Malili
- Identifikasi kejadian bencana angin puting beliung Dsn Lagaroang Desa Baruga Kec. Malili
- Penanganan darurat pemasangan terpal untuk mengantisipasi longsor susulan di Dsn. Batu Merah Kelurahan Malili

- Identifikasi bencana angin kencang di Desa Kalpataru Kec. Tomoni
 - Identifikasi kejadian banjir di Desa Kawata Kec. Wasuponda
 - Identifikasi longsor Desa Mantadulu Kec. Angkona
 - Identifikasi runtuhnya tanggul nasional di Ds Teeromu Kec. Mangkutana
 - Identifikasi tanggul jebol di Desa Margolembo Kec. Mangkutana
 - Identifikasi kebakaran rumah di Dsn. Lagolo Desa Wasuponda Kec. Wasuponda
 - Identifikasi banjir sungai kalaena di Desa Pattengko Kec. Tomtim
 - Identifikasi banjir Sungai Kalaena Desa Manggala Kec. Mangkutana
 - Identifikasi banjir Sungai Kalaena Desa Maleku Kec. Mangkutana
- **Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana**
- Target *output* kegiatan Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun sebanyak 1 unit dan berdasarkan anggaran kas, target kinerja fisiknya ditetapkan pada Triwulan III TA. 2019. Pekerjaan yang direncanakan yaitu Normalisasi Saluran Pembuang Sungai Tokke Desa Mantadulu Kec. Angkona dan Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili, saat ini dalam proses pemilihan konsultan perencana pada pejabat pengadaan. Adapun realisasi keuangannya masih 0% .
- **Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana**
- Target *output* kegiatan adalah Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi sebanyak 1 unit dan dan berdasarkan anggaran kas, target kinerja fisiknya ditetapkan pada Triwulan III TA. 2019. Pekerjaan yang direncanakan yaitu Pembangunan Bronjong Sungai Lepa-Lepa Kec. Burau dan Pembangunan Bronjong Sungai Lembo Desa Margolembo Kec. Mangkutana, saat ini dalam proses pemilihan konsultan perencana pada pejabat pengadaan. Adapun realisasi keuangannya masih 0%.

➤ **Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam kondisi Tanggap darurat Pasca Bencana**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun sebanyak 1 unit. dan berdasarkan anggaran kas, target kinerja fisiknya ditetapkan pada Triwulan III TA. 2019. Pekerjaan yang direncanakan yaitu rehabilitasi jembatan Sungai Tokke Desa Mantadulu Kec. Angkona, saat ini dalam proses pemilihan konsultan perencana, sehingga realisasi keuangannya masih 0%

➤ **Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana**

Target *output* kegiatan adalah Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar 90% dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah 22% dan terealisasi 13,64% dengan persentase capaian 62%. Serapan anggarannya masih rendah yaitu 0% disebabkan karena terdapat SPJ Pertanggungjawaban yang belum di-GU-kan. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya sediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

2 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Pada Triwulan I TA. 2019, persentase capaian dari Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana masih 0%. Hal ini disebabkan karena adanya semua kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II dan III, sedangkan pada Triwulan I TA. 2019 masih dalam proses persiapan.

➤ **Pemetaan Potensi Ancaman Bencana**

Target *output* kegiatan adalah tersedianya dokumen pemetaan ancaman bencana sebanyak 1 dokumen (Penyusunan dokumen Rencana Kontigensi Gempa Bumi) dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sebanyak 150

orang dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Pelatihan tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana serta adaptasi perubahan iklim sebanyak 150 orang dan dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Sosialisasi Daerah Rawan Bencana**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Relawan dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana sebanyak 150 orang dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana**

Target *output* kegiatan adalah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebanyak 78 unit dan dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Apel Siaga Bencana**

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Apel siaga Bencana sebanyak 1 kali dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Simulasi Penanggulangan Bencana**

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya Simulasi Penanggulangan Bencana sebanyak 1 kali dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

➤ **Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat

sebanyak 50 orang dan berdasarkan anggaran kas, kegiatan ini direncanakan pada Triwulan III TA. 2019 sehingga capaian pada Triwulan I TA. 2019 masih 0%.

3. Program Kedaruratan dan Logistik

Pada Triwulan I TA. 2019, Program Kedaruratan dan Logistik menyerap anggaran sebesar Rp 108.374.950,- (56,14%) dari target Rp 193.030.300,-. Sedangkan Target kinerja 6% dan terealisasi 22,20% dengan persentase capaian kinerja sebesar 370%. Realisasi keuangan yang kurang dari 100% disebabkan karena terdapat kegiatan yang SPJ Pertanggungjawabannya yang belum di-GU-kan, sedangkan capaian kinerja yang melebihi dari target disebabkan karena tinggi intensitas kejadian bencana yang terjadi dibandingkan dengan target yang direncanakan

➤ **Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**

Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 10 kejadian dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah 2 kejadian dan terealisasi 19 kejadian dengan persentase capaian kinerja 950%, namun realisasi keuangan masih 0% karena terdapat SPJ Pertanggungjawaban yang belum di-GU-kan. Kejadian bencana yang terjadi pada Triwulan I yaitu Banjir 2 kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 2 kejadian, Kebakaran Lahan 3 kejadian, Kebakaran Rumah 4 kejadian, Cuaca Ekstrem 12 kejadian dan Gempa Bumi 10 kejadian. Dari 33 kejadian bencana, terdapat 19 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, selebihnya tidak terhitung karena kejadian tersebut tidak terdapat korban hanya dilakukan penangan pembersihan untuk kejadian bencana seperti pohon tumbang. Pada dasarnya anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana.

➤ **Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana**

Target *output* kegiatan adalah jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan dan kebutuhan dasarnya sebanyak 10 kejadian dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah 2 kejadian dan terealisasi sebanyak 11 kejadian

dengan persentase capaian kinerja 550%, yang terdiri dari Banjir 2 kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 2 kejadian, Kebakaran Lahan 3 kejadian, Kebakaran Rumah 4 kejadian, Cuaca Ekstrim 12 kejadian dan Gempa Bumi 10 kejadian. Dari 33 kejadian bencana, yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya sebanyak 11 kejadian, dan selebihnya seperti kebakaran hutan dan lahan serta gempa bumi, tidak dilakukan pemberian pelayanan kebutuhan dasar dengan pertimbangan bahwa jenis bencana tersebut tidak berdampak langsung terhadap jiwa dan harta benda. Sedangkan untuk kejadian orang hilang hanya difasilitasi pencarian dan pertolongan. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 98,44%.

➤ **Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana**

Target *output* kegiatan adalah tertanganinya kejadian tanggap darurat sebanyak 5 kejadian dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah 1 kejadian dan terealisasi 1 kejadian (100%) yaitu Pembentukan Posko Siaga Bencana dalam rangka mengantisipasi Cuaca Ekstrim di Desa Mabonta Kec. Bauru, sedangkan realisasi keuangannya masih 0% karena pembentukan posko tersebut tidak menggunakan anggaran. Dan pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kejadian bencana.

➤ **Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat**

Target *output* kegiatan adalah terlaksananya pemberdayaan Tim Reaksi Cepat sebanyak 30 orang dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah 19 orang dan terealisasi 19 orang (100%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 56,74% Hal ini disebabkan karena terdapat SPJ pertanggungjawaban yang belum di-GU-kan. Dan pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kejadian bencana.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada Triwulan I TA. 2019, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran sebesar Rp 73.657.888,- (55,48%) dari target Rp 132.775.450,- (100%). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang

sifatnya disediakan serta terdapat belanja yang sifatnya riil cost. Adapun target kinerja pada Triwulan I TA. 2019 adalah 20,44% dan terealisasi 18,38% dengan persentase capaian 89,93%

➤ **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Target *output* kegiatan adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda sebanyak 800 surat dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 200 surat dan terealisasi sebanyak 169 surat (surat keluar sebanyak 43 dan surat masuk sebanyak 126 surat).

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Target *output* kegiatan adalah jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan sebanyak 60 rekening dan target pada Triwulan I TA 2019 sebanyak 15 rekening dan terealisasi 9 rekening (rekening telepon 3, rekening air 3 dan rekening telepon 3). Target yang tidak terealisasi disebabkan karena adanya mutasi aset gedung dan bangunan yang dilakukan pada saat perpindahan kantor, jumlah rekening air dan listrik serta telepon (Nomor On Call) berkurang menjadi 3 rekening setiap bulannya. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pemakaian. Pembayaran listrik dan air kantor sifatnya fluktuatif disesuaikan dengan jumlah pemakaian.

➤ **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan sebanyak 1 orang dan target pada Triwulan I TA 2019 sebanyak 1 orang dan terealisasi 100% dengan pembayaran Honor Upah Jasa Cleaning Service selama 2 bulan (Januari dan Februari 2019), sedangkan pembayaran honor untuk bulan Maret 2019 baru akan di LS-kan di awal april 2019. Selain jasa tenaga kebersihan, kegiatan ini juga memfasilitasi kebutuhan alat dan bahan pembersih, penggunaan anggaran untuk penyediaan alat dan bahan pembersih disesuaikan dengan kebutuhan.

➤ **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan peralatan kerja agar dapat berfungsi dengan baik. Target *output* kegiatan adalah tersedianya

pembayaran untuk perbaikan peralatan kerja sebanyak 107 unit dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 17 unit dan terealisasi 3 unit (17,65%), adapun peralatan yang dipelihara yaitu Komputer 1 unit dan printer 2 unit. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kondisi peralatan, sehingga hanya digunakan apabila terdapat peralatan kerja yang perlu mendapat perbaikan.

➤ **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Target *output* kegiatan adalah jumlah ATK yang disediakan sebanyak 50 jenis setiap triwulannya. Sedangkan realisasi pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 48 jenis (96%). Penggunaan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor

➤ **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Target *output* kegiatan adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan dan terealisasi 3 jenis (100%) terdiri dari cetak, penggandaan dan jilid. Penggunaan anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor. Target *output* kegiatan adalah tersedianya komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 8 jenis setiap triwulan. Target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 8 jenis dan terealisasi 2 jenis (25%) yaitu penyediaan kabel kombinasi dan steker. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

➤ **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Target *output* kegiatan adalah jumlah makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 1000 kotak dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 250 kotak dan terealisasi 20 kotak (8%). Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan minat baca serta meningkatkan pengetahuan bagi aparatur dalam menjalankan

tugas dan fungsinya. Target *output* kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kebar sebanyak 60 exemplar (surat kabar lokal 12 expl, surat kabar regional 36 expl dan surat kabar nasional 12 expl) dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 15 exemplar dan terealisasi 15 expl (100%) terdiri dari koran lokal 3 expl, koran regional 12 expl dan koran nasional 3 expl. Kegiatan ini bersifat riil cost.

➤ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Target output kegiatan adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 jenis setiap triwulan. Dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 2 jenis dan terealisasi 1 jenis (50%) yaitu penyediaan BBM Operasional. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

➤ **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD serta sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, propinsi dan kabupaten sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Target *output* kegiatan adalah jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan sebanyak 34 kali dan terget pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 7 kali dan terealisasi 24 kali (342.86%). Capaian yang melebihi target disebabkan karena terdapat beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD. Sehingga anggaran yang disediakan bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi melebihi dari target karena pelaksanaannya disesuaikan dengan undangan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh propinsi/pusat.

➤ **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan sebanyak 4 orang dan target pada Triwulan I TA. 2019 dan terealisasi hanya 1 orang (25%) yaitu tenaga administrasi. Disediakan honor

untuk upah jasa sopir 3 orang dan tenaga administrasi 1 orang. Dan saat ini dalam tahap rekrutmen sehingga alokasi anggaran yang disediakan belum terealisasi.

➤ **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monev tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan sesuai dengan anggaran kas serta memonitoring kegiatan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini, mulai dari kunjungan kelokasi pasca bencana, bantuan bagi korban bencana dan sebagainya serta monitoring pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Target *output* kegiatan adalah tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan sebanyak 4 dokumen dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%). Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan yaitu Monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan untuk Triwulan I TA. 2019 terdiri dari :

- Formulir Evaluasi Renja Triwulanan
- Realisasi Anggaran Triwulanan
- Realisasi Fisik (Konstruksi) APBD Triwulanan

➤ **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 209 kali dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 42 kali dan terealisasi 63 kali (150%). Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah disesuaikan dengan undangan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kecamatan.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menyerap anggaran sebesar Rp 6.870.000,- (21,63%) dari target Rp 31.760.000,- (100%). Adapun target kinerja pada Triwulan I TA. 2019 adalah 15,79% dan terealisasi 2,60% dengan persentase capaian 16,68%. Realisasi keuangan dan kinerja yang masih rendah disebabkan karena terdapat kegiatan yang sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

- **Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan sebanyak 1 unit dan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan III TA. 2019, sehingga pada Triwulan I TA. 2019, kegiatan tersebut belum terealisasi.
- **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Target *output* kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 15 unit dan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan II TA. 2019, sehingga pada Triwulan I, kegiatan tersebut belum terealisasi dan masih dalam proses pengadaan :
- **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**
Target *output* kegiatan adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 2 unit dan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan III TA. 2019, sehingga pada Triwulan I, kegiatan tersebut belum terealisasi
- **Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir**
Target *output* kegiatan adalah jumlah taman/lapangan/fasilitas parkir yang dibangun dan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan III TA. 2019, sehingga pada Triwulan I, kegiatan tersebut belum terealisasi
- **Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor**
Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor sebanyak 2 unit Namun realisasi keuangan masih 0%, hal ini disebabkan karena kedua unit bangunan kantor belum ada yang memerlukan perbaikan. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi bangunan gedung kantor.
- **Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**
Target *output* kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 10 unit dan terealisasi 2 unit (20%). Adapun kendaraan dinas/operasional yang dipelihara yaitu kendaraan roda empat (doble cabin) 2 unit. Sedangkan kendaraan dinas/operasional lainnya masih dalam kondisi yang baik. Adapun serapan anggaran pada Triwulan I TA. 2019 adalah Rp 6.870.000,- (25,67%) dari target Rp 26.760.000,-. Pada dasarnya kegiatan ini

sifatnya disediakan dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi kendaraan dinas/operasional

➤ **Pembangunan Pagar Kantor**

Target *output* kegiatan adalah jumlah pagar kantor yang dibangun sebanyak 1 unit dan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan III TA. 2019, sehingga pada Triwulan I, kegiatan tersebut belum terealisasi.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

➤ **Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Target *output* kegiatan adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebanyak 1 dokumen dan target pada Triwulan I TA. 2019 adalah Penyusunan Dokumen Lakip 1 dokumen dengan realisasi 100%, namun realisasi keuangan hanya 25%, hal ini disebabkan karena masih terdapat SPJ yang belum di-GU-kan

➤ **Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun**

Target *output* kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun sebanyak 3 dokumen dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100%. Adapun laporan yang disusun yaitu Laporan Akhir Tahun 2018, namun realisasi keuangannya masih 0%.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menyerap anggaran sebesar Rp 5.380.000,- (35,87%) dari target Rp 15.000.000,- (100%). Adapun target kinerja pada Triwulan I TA. 2019 adalah Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan sebanyak 2 orang dan terealisasi 2 orang dengan persentase capaian 100%.

➤ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan sebanyak 10 orang dan target pada Triwulan I TA 2019 sebanyak 2 orang dan terealisasi 2 orang (100%). Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 35,87%. Anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaannya disesuaikan dengan

undangan/pemanggilan peserta. Adapun kegiatan pelatihan/bimtek/sosialisasi yang diikuti yaitu :

- Pelatihan Jungle Rescue yang diselenggarakan oleh BASARNAS Wilayah Kendari, diikuti oleh TRC 2 orang

8. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Adapun target dari Indikator Kinerja Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD pada Triwulan I TA. 2019 adalah persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu sebesar 16,67% dan terealisasi 16,67% dengan persentase capaian 100%.

➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Target *output* kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 6 dokumen dan target pada Triwulan I TA. 2019 sebanyak 1 dokumen yaitu Dokumen DPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi 100%. Sedangkan realisasi keuangan masih 0% karena anggaran kas kegiatan tersebut diletakkan pada triwulan II, III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase masyarakat yang mendapat Pengetahuan kebencanaan (%)	-	-	1.07	0.63	0.63	-	1.03	-	0.63	-	
2	Persentase penanganan bencana (%)	-	-	94,12	97,06	100	-	100	-	100	-	
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)	-	-	27.27	18.18	18.18	-	27.27	-	18.18	-	
4	Jumlah Skor Lakip	-	-	55	60	70	-	90,86	-	70	-	

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan

Target dari indikator tersebut yang harus dicapai pada tahun 2018 adalah 1.7% dan terealisasi 1.03%, dengan persentase capaian sebesar 96.26%. Jumlah masyarakat pada daerah rawan bencana yang ditargetkan untuk mendapatkan pengetahuan kebencanaan sebanyak 850 orang namun yang terealisasi hanya 823 orang. Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu

- Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan :

- Pemetaan Potensi Ancaman Bencana
- Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- Apel Siaga Bencana
- Simulasi Penanggulangan Bencana
- Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat

- **Hambatan/Kendala**

Tidak tercapainya target disebabkan karena jumlah peserta yang diundang pada beberapa kegiatan kebencanaan yang diadakan, namun yang hadir tidak sesuai target. Hal ini dapat disebabkan karena tempat pelaksanaan terpusat disuatu tempat sementara peserta yang diundang berasal dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Hambatan atau kendala yang lain yaitu pelaksanaan kegiatan diakhir tahun, hal ini berpengaruh terhadap peserta yang hadir karena banyaknya kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD lain diwaktu yang bersamaan. Namun pada dasarnya BPBD telah mengupayakan mengundang peserta sesuai dengan target yang direncanakan.

- **Solusi**

Adapun solusi yang dapat ditempuh untuk kedepannya yaitu melaksanakan kegiatan kebencanaan di beberapa zona atau wilayah sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang diundang. Dan solusi selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan di awal tahun atau sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
- **Efisiensi Anggaran**

Terdapat beberapa bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran ini yaitu :

 - Efisiensi anggaran belanja pakaian kerja lapangan pada kegiatan
 - Efisiensi anggaran pada pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana dengan melibatkan dunia usaha seperti PT. Vale Indonesia Tbk, sehingga anggaran yang disediakan di APBD tidak digunakan
 - Efisiensi anggaran dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan meminimalkan waktu pelaksanaannya tanpa mengurangi tujuan dari pelaksanaan kegiatan
 - Efisiensi anggaran dengan cara memaksimalkan Tim dari BPBD sebagai narasumber dalam kegiatan sehingga tidak membutuhkan honor narasumber
- **Efisiensi Sumber Daya**

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut.

2. Persentase Penanganan Bencana

Target dari indikator tersebut tertanganinya kejadian bencana pada tahun 2018 sebesar 94,12 % dan terealisasi 100% dengan persentase capaian 106.25%. Penanganan kejadian bencana yang dilakukan terdiri dari penanganan bencana dilokasi kejadian, kunjungan ke lokasi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, hunian sementara (tenda), kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya, serta bantuan hibah bagi korban bencana kebakaran yang bersumber dari BPKD dengan rekomendasi dari BPBD. Dimana kesemua hal tersebut sudah tercakup dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur beserta OPD terkait seperti BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Perikanan, Kelautan dan Pangan, Dinas PU, Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar, serta OPD terkait lainnya. Berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2018, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 65 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 20 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 10 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 10 Kejadian), Cuaca Ekstrem 5 Kejadian, Banjir 6 Kejadian, Tanah Longsor 1 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 7 Kejadian dan Gempa Bumi 26 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Namun kejadian bencana tahun 2017, dampaknya lebih besar dibanding tahun ini karena menimbulkan korban jiwa. Dan kejadian yang mendominasi di tahun 2018 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Namun pada dasarnya BPBD Kab. Luwu Timur telah berupaya semaksimal mungkin agar semua kejadian bencana tersebut dapat tertangani dengan baik. Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

- Program Kedaruratan dan Logistik yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
 - Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
 - Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Persentase Penanganan Bencana, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan personil dalam penanggulangan bencana
- Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana
- Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Memaksimalkan tenaga Tim Relawan seperti SAR, TAGANA yang tersebar di seluruh kecamatan
- Memberdayakan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ada di BPBD
- Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
- Mengikutsertakan TRC BPBD pada kegiatan pelatihan ataupun Diklat tentang kebencanaan yang diadakan oleh BPBD Propinsi maupun BNPB.
- Penempatan Posko Darurat Bencana di daerah lokasi bencana
- Penempatan Posko Siaga Bencana di daerah rawan bencana
- Melakukan monitoring di lokasi rawan bencana serta lokasi pasca bencana
- Melakukan pendataan awal terkait jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait yang lokasinya berdekatan dengan pada daerah rawan bencana.
- Penempatan papan himbauan/peringatan dini bencana di beberapa titik rawan bencana

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran 2 (dua) dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana seperti : Makanan Siap Saji,

Sandang, Tenda Gulung, selimut, Family Kit, Makanan Tambahan Gizi, Kids Ware, Perlengkapan Sekolah, Karung, Perlengkapan Makanan, Perlengkapan Rekreasional, Paket Kesehatan Keluarga, Lauk Pauk, Masker, Kantung Mayat dan Matras

- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bantuan sosial dari dunia usaha dan masyarakat.
- Untuk biaya paket pengiriman bantuan logistik juga difasilitasi oleh BNPB yaitu biaya paket pengiriman dari Jakarta ke Makassar sehingga yang ditanggung hanya biaya dari Makassar ke Malili.

Anggaran yang tersedia untuk penanganan kedaruratan dan logistik korban bencana sangatlah terbatas, sehingga BPBD memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga penggunaan anggaran yang disediakan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik dapat diminimalisir.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran 2 (dua), maka dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018, didukung dengan adanya sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan dan sumberdaya anggaran. Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 33 orang yang terdiri dari 21 orang PNS, 2 orang Upah Jasa, dan 19 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti

Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan dsb.

3. Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Target dari indikator tersebut yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sarana fisik dan non fisik pasca bencana sebanyak 7 unit (31,82%) dan terealisasi 100% yaitu :

- Normalisasi (P=263 m) dan Bronjong (pabrikasi) (P=58 m) Sungai Lauwo Desa Lauwo Kec. Burau Sungai Lauwo Desa Lauwo Kec. Burau
 - Pembangunan Tanggul Dsn. Singgeni Desa Jalajja Kec. Burau (391,7 m³)
 - Bronjong Sungai Lopi Desa Margolembo Kec. Mangkutana (P=72 m)
 - Penguatan tebing Sungai Desa Wonorejo Timur Kec. Mangkutana (pasangan turap beton dan talud proteksi P = 246 m)
 - Penguatan Tebing Sungai Dusun Korondeme Desa Koroncia Kec. Mangkutana (pasangan turap beton dan talud proteksi P = 295 m)
 - Penguatan Tebing Sungai Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena (pasangan turap beton dan talud proteksi P = 356 m)
 - Penguatan Tebing Sungai Desa Tenrisanai Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena (pasangan turap beton dan talud proteksi P = 210 m)
- Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan
- Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana.
 - Perbaikan sarana dan prasarana umum akibat bencana
 - Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat pasca bencana

- Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai pasca bencana
 - Rehabilitasi/Rekonstruksi turap/talud/bronjong pasca bencana
 - Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- Hambatan/Kendala
- Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan/kendala yang dihadapi yaitu :
- Lambatnya proses lelang oleh ULP, sehingga sehingga dibutuhkan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan
 - Adanya perubahan UMK sehingga HPS yang telah disusun sebelumnya, dilakukan perbaikan kembali sehingga memakan waktu lebih lama.
 - Terbatasnya personil BPBD dalam penanganan dan pengawasan pekerjaan fisik dilapangan.
- Solusi
- Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :
- Memaksimalkan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan fisik oleh PPK
 - Memaksimalkan fungsi pengawasan dari Konsultan Pengawas sebagai perpanjangan tangan dari PPK
 - Diajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan oleh BPBD ke BNPB terkait Dana Hibah hingga bulan Desember 2018.
- Efisiensi Anggaran
- Dalam pencapaian sasaran 3 yaitu perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik pasca bencana, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pembiayaannya, maka BPBD berupaya mengidentifikasi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana untuk dapat difasilitasi melalui pembiayaan pusat atau provinsi dengan mengajukan proposal, sehingga nantinya anggaran APBD yang digunakan dapat diminimalkan. Pada tahun 2018 BPBD Kab. Luwu Timur mengelola Dana Hibah sebesar **Rp. 6.894.803.000,-** (*Enam Milyar Delapan Ratus*

Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) yang bersumber dari Kementerian Keuangan melalui BNPB yang diperuntukkan untuk membangun pengaman sungai untuk mengendalikan banjir sebanyak 4 unit di Kabupaten Luwu Timur. Ini berarti bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran APBD dan memaksimalkan penggunaan dana Pusat (BNPB) dalam perbaikan sarana dan prasarana fisik pasca bencana.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

Pencapaian sasaran 3 terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada

4. Jumlah Skor Lakip

Indikator ini merupakan indikator pendukung dalam pencapaian indikator utama dan merupakan Hasil Evaluasi AKIP. Target dari indikator tersebut yaitu 55 dan terealisasi 90,86 (predikat A) dengan persentase capaian 165,2%. Sedangkan capaian tahun lalu adalah 63,89 (predikat B). Dan ini berarti bahwa terdapat kemajuan dari tahun sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian di tahun 2018 antara lain yaitu :

- Dokumen Renstra telah direviu secara berkala dan diselaraskan dengan RPJMD
- Telah dilakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target rencana aksi
- Telah dilakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan
- Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

- IKU telah dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan. Sedangkan pada tahun 2018 nilai yang diperoleh 90,86 dengan persentase capaian sebesar 165,2 %. Nilai yang sangat maksimal ini diperoleh dengan dilakukan penyempurnaan dokumen dengan cara melengkapi komponen yang menjadi catatan/rekomendasi tahun sebelumnya, namun masih terdapat komponen yang masih perlu disempurnakan yaitu penerapan punishment and reward terhadap capaian kinerja dan perbandingan dengan target nasional (jika ada) :

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2019 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2018, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 65 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 20 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 10 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 10 Kejadian), Cuaca Ekstrem 5 Kejadian, Banjir 6 Kejadian, Tanah Longsor 1 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 7 Kejadian dan Gempa Bumi 26 kejadian. Jumlah kejadian bencana tahun 2018 lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Namun kejadian bencana tahun 2017, dampaknya lebih besar dibanding tahun ini karena menimbulkan korban jiwa. Dan kejadian yang mendominasi di tahun 2018 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut
2. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali seperti pembakaran lahan/hutan, penebangan liar dan

sebagainya berpotensi menimbulkan bencana banjir, tanah longsor dan bencana kekeringan. Pembukaan lahan dalam wilayah hutan pada Daerah Aliran Sungai Kalaena dan Larona menyebabkan meningkatnya aliran permukaan sehingga debit air Sungai Kalaena dan Sungai Larona bertambah setiap tahun. Luapan air Sungai Kalaena dan Sungai Larona terjadi setiap curah hujan tinggi dan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Kondisi ini memerlukan upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.
4. Kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas pegunungan yang terjal dan luas, sungai yang lebar dan dalam serta daerah pesisir yang menjadi tempat hunian masyarakat berpotensi bahaya dan mengancam kehidupan masyarakat. Banyaknya korban manusia yang tenggelam di sungai, dilaut, dan hilang, membutuhkan upaya penyelamatan dan pencarian korban secara profesional. Olehnya itu keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang handal dibidang ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
5. Terjadinya perubahan bentang alam akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan diluar PT. Vale Indonesia Tbk.
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

2.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman Gempa Bumi, Longsor, Banjir Bandang (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- h. Membentuk Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
- i. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD

- j. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana
- k. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- l. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- m. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- n. Membentuk Pos Terpadu Pelayanan Kedaruratan di Kabupaten Luwu Timur yang secara khusus dan professional menangani penyelamatan dan pencarian korban bencana.
- o. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- p. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- q. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,337,627,000	BELANJA TIDAK LANGSUNG				2,332,795,900	
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji & tunjangan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	1,464,311,000	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji & tunjangan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	1,459,479,900	
	Tambahan Penghasilan Lainnya	Terbayarnya tambahan penghasilan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	873,316,000	Tambahan Penghasilan Lainnya	Terbayarnya tambahan penghasilan aparatur BPBD	BPBD	21 orang	873,316,000	
	BELANJA LANGSUNG				5,280,988,900	BELANJA LANGSUNG				4,787,915,670	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	850,679,900	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi		100%	825,679,900	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	BPBD	850 surat	4,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (surat)	BPBD	850 surat	4,200,000	

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air kantor sebanyak 60 rekening	78,649,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air kantor sebanyak 60 rekening	78,649,200	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang	20,800,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	BPBD	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang	20,800,000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	BPBD	Pemeliharaan komputer 6 unit, notebook 8 unit, Printer 10 unit, AC 6 unit, LCD 1 unit, Kamera 1 unit, Finger print 1 unit, Mesin babat 1 unit, Perahu Karet 3 unit, Genset 2 unit, Watertreatmen 1 unit, Tenda Posko 2 unit, Tenda Keluarga 5 unit, Tenda Pleton 2 unit, Tabung Alat Selam 6 unit, Tabung Pemadam Kebakaran 22 unit, Chainsaw 1 unit, Tenda Pengungsi 2 unit, Wireless 1 unit (105 unit)	60,450,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	BPBD	Pemeliharaan komputer 6 unit, notebook 8 unit, Printer 10 unit, AC 6 unit, LCD 1 unit, Kamera 1 unit, Finger print 1 unit, Mesin babat 1 unit, Perahu Karet 3 unit, Genset 2 unit, Watertreatmen 1 unit, Tenda Posko 2 unit, Tenda Keluarga 5 unit, Tenda Pleton 2 unit, Tabung Alat Selam 6 unit, Tabung Pemadam Kebakaran 22 unit, Chainsaw 1 unit, Tenda Pengungsi 2 unit, Wireless 1 unit (105 unit)	55,450,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	BPBD	50 jenis	30,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	BPBD	50 jenis	30,000,000	

6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD	3 jenis	48,350,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPBD	3 jenis	48,350,000	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	BPBD	Tersedianya komponen alat listrik kantor sebanyak 8 jenis	17,500,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	BPBD	Tersedianya komponen alat listrik kantor sebanyak 8 jenis	17,500,000	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD	Koran lokal 12 expl, regional 36 expl dan nasional 12 expl (60 expl)	7,200,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPBD	Koran lokal 12 expl, regional 36 expl dan nasional 12 expl (60 expl)	7,200,000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 jenis	19,198,400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	BPBD	2 jenis	19,198,400	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	BPBD	1000 kotak	20,575,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	BPBD	1000 kotak	20,575,000	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	BPBD	47 kali	295,780,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	BPBD	47 kali	285,780,000	

12	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	BPBD	5 orang	118,000,000	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	BPBD	5 orang	118,000,000	
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	45,925,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Kab. Luwu Timur	4 Dokumen	40,925,000	
14	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	220 Kali	84,052,300	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	220 Kali	79,052,300	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	340,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi		100%	340,000,000	
18	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD	3 unit	100,000,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPBD	3 unit	100,000,000	
19	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	20 unit	100,000,000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	20 unit	100,000,000	
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BPBD	2 Unit	20,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BPBD	2 Unit	20,000,000	

21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPBD	15 unit	120,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPBD	15 unit	120,000,000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya		10 orang	75,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya		10 orang	60,000,000	
24	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Daerah	10 Orang	75,000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	Dalam dan Luar Daerah	10 Orang	60,000,000	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (%)		100%	12,000,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (%)		100%	12,000,000	
25	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	BPBD	1 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	BPBD	1 Dokumen	6,000,000	
26	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	BPBD	3 Dokumen	6,000,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	BPBD	3 Dokumen	6,000,000	
VI	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu		100%	12,500,000	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu		100%	12,500,000	

27	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	BPBD	6 Dokumen	12,500,000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	BPBD	6 Dokumen	12,500,000	
VII	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruks		4 Unit	1,780,627,750	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruks		4 Unit	1,415,627,750	
28	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Kab. Luwu Timur	1 Dokumen	80,577,750	Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	Kab. Luwu Timur	1 Dokumen	80,577,750	
29	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Luwu Timur	90%	165,000,000	Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Kab. Luwu Timur	90%	165,000,000	
30	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana yang dibangun	Kab. Luwu Timur	1 unit	440,000,000	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana	Jumlah Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana yang dibangun	Kab. Luwu Timur	0 unit	-	

31	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	Kec. Burau	1 unit	534,050,000	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	Kec. Burau	2 unit	534,050,000	
32	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	Kec. Mangkutana	2 unit	561,000,000	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	Kec. Mangkutana	2 unit	636,000,000	
VIII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana		500 orang	699,857,000	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana		500 orang	651,783,770	
33	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	BPBD	83 unit	99,812,000	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	BPBD	83 unit	99,812,000	
34	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	2 Kali	35,865,000	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	2 Kali	35,865,000	
36	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	82,150,000	Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	82,150,000	

37	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	Simulasi 2 kali	64,385,000	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur	Simulasi 2 kali	64,385,000	
38	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	Kab. Luwu Timur	50 orang	122,415,000	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	Kab. Luwu Timur	50 orang	122,415,000	
39	Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Luwu Timur	150 orang	222,530,000	Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Luwu Timur	150 orang	174,456,770	
40	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	72,700,000	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	Kab. Luwu Timur	150 orang	72,700,000	
IX	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender		20%	1,510,324,250	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender		20%	1,470,324,250	
41	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	219,974,250	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	219,974,250	

42	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	160,590,000	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Kab. Luwu Timur	10 kejadian	160,590,000	
43	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	Kab. Luwu Timur	5 kejadian	99,500,000	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	Kab. Luwu Timur	5 kejadian	99,500,000	
44	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	BPBD dan Lokasi Bencana	30 Orang	1,030,260,000	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	BPBD dan Lokasi Bencana	30 Orang	990,260,000	
JUMLAH TOTAL					7,618,615,900	JUMLAH TOTAL					7,120,711,570

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyalarsan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten maka ditetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang Tahun 2020 memuat 8 Program 38 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.787.915.670,-

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel. 4 (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi				
1.	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana (Normalisasi Sungai Asuli Desa Langkea Raya Kec. Towuti)	Kec. Towuti	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	700 m	
2.	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai Pasca Bencana (Lanjutan Kedua Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili dan Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Labose Desa Laskap Kec. Malili)	Kec. Malili	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	135 m dan 200 m	Tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan melalui Dana Hibah dari BNPB, namun masih perlu lanjutan/penambahan agar lebih maksimal pengendalian banjir di lokasi tersebut sehingga diusulkan penganggaran APBD
3.	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/bronjong (Pekerjaan Talud Dusun Bunga Tanah – Dusun Kunyi-kunyi Desa Kalaena)	Kec. Wotu	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	1000 m	
4	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/bronjong (Pekerjaan Talud Dusun Poleonro Desa Kalaena)	Kec. Wotu	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air yang dibangun	200 m	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu :

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntalibitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

.3.1.2 RPJMN IV (2020-2024)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, merupakan tahapan terakhir dari RPJPN (2005-2025) sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan

dalam RPJPN. Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 yaitu :

1. Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. **“ Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**
7. Memperkuat stabilitas Polhukkanham dan tranformasi pelayanan publik.

Terkait Agenda ke-6, maka Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan akan diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Terkait dengan **“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim”**, maka agenda konvergensi antara Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 Tahun 2020, dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020) yaitu **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** maka sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan
2. **“Infrastruktur dan pemerataan wilayah”**
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja
4. **“Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup”**
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Jadi dalam hal ini, Prioritas Nasional yang harus diwujudkan terkait Penanggulangan Bencana yaitu Prioritas 2 (dua) yaitu **“Infrastruktur dan pemerataan wilayah”** dengan arah kebijakan yang tempuh yaitu **“Meningkatkan Standar Bangunan dan Memperkuat Rantai Pasokan Konstruksi melalui Inovasi kebencanaan”**, dan Program Nasional yang perlu dilakukan adalah Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dan Prioritas 4 (empat) yaitu **“Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup”** dengan

arah kebijakan **“Mengoptimalkan Pembangunan Berketahanan Bencana”** dan Program Nasional yang perlu dilaksanakan yaitu Penguatan Ketahanan Bencana

3.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2020 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan.

Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu **“Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat”**, dengan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu Percepatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam menyusun RKPD Tahun 2020 terkait SPM Penanggulangan Bencana yaitu :

1. Layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian risiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana
2. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontingensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi
3. Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, evakuasi dan pertolongan korban bencana.

9.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel

1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah:

1. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana.
3. Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD.

Tabel.5
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase peningkatan pelayanan penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	0.63%
			Meningkatnya penanganan darurat bencana serta perlindungan bagi masyarakat korban bencana	Persentase penanganan bencana (%)	100%
			Tertanganinya seluruh aspek kehidupan masyarakat pasca bencana pada sektor perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik serta non fisik	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi (%)	18.18%
2.	Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Prestasi LAKIP berdasarkan Opini Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor LAKIP	70

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur

merencanakan 8 program dengan 37 kegiatan, yang terdiri dari 3 program utama dengan 15 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 5 program pendukung dengan 22 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi SKPD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

3.1.1 Program Utama

1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- a. Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD
- c. Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana
- d. Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana

2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

- a. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
- b. Apel Siaga Bencana
- c. Penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
- d. Simulasi Penanggulangan Bencana
- e. Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat
- f. Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan adaptasi perubahan iklim
- g. Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

3. Program Kedaruratan dan Logistik

- a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- b. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
- c. Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana
- d. Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)

3.1.2 Program Pendukung

1. Program Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- l. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- m. Monitoring dan Evaluasi
- n. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

TABEL 6 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	Non Urusan								
0	0	-							
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	825,679,900			
0.00.1.05.02.001.00	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	850 surat	4,200,000	Pendapatan Daerah	0 surat	0
0.00.1.05.02.001.00	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang terbayarkan	60 Rekening	78,649,200	Pendapatan Daerah	0 Rekening	0
0.00.1.05.02.001.00	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 orang	20,800,000	Pendapatan Daerah	0 orang	0

0.00.1.05.02.001.00 7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	105 unit	55,450,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0
0.00.1.05.02.001.00 8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah ATK yang disediakan	50 jenis	30,000,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0.00.1.05.02.001.00 9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	48,350,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0.00.1.05.02.001.01 0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	17,500,000	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0.00.1.05.02.001.01 2	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.000 Kotak	20,575,000	Pendapatan Daerah		0 Kotak	0
0.00.1.05.02.001.01 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	7,200,000	Pendapatan Daerah		0 eksemplar	0
0.00.1.05.02.001.01 6	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	19,198,400	Pendapatan Daerah		0 jenis	0
0.00.1.05.02.001.01 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	47 Kali	285,780,000	Pendapatan Daerah		0 Kali	0

0.00.1.05.02.001.01 9	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	SKPD	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	5 orang	118,000,000	Pendapatan Daerah		0 orang	0
0.00.1.05.02.001.02 1	Monitoring dan Evaluasi	ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	40,925,000	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0
0.00.1.05.02.001.02 2	Kunjungan kerja dalam daerah	NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	220 Kali	79,052,300	Pendapatan Daerah		0 Kali	0
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	340,000,000		
0.00.1.05.02.002.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	100,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
0.00.1.05.02.002.01 2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	100,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
0.00.1.05.02.002.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	20,000,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0

0.00.1.05.02.002.02 4				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	120,000,000	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
0	0	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	12,000,000			
0.00.1.05.02.005.00 6				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 Dokumen	6,000,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0.00.1.05.02.005.00 8				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen	6,000,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	6		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100%	12,500,000			
0.00.1.05.02.006.00 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 Dokumen	12,500,000	Pendapatan Daerah	0 Dokumen	0
0	0	4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	60,000,000		0	
0.00.1.05.02.004.00 3				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	10 Orang	60,000,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0

1				Wajib										
1	5			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	5	60		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	4 unit	1,415,627,750						
01.05.1.05.02.060.006				Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	1 Dokumen	80,577,750	Pendapatan Daerah		0 Dokumen	0		
01.05.1.05.02.060.007				Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana	TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	2 Unit	534,050,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0		
01.05.1.05.02.060.008				Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana	MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	2 unit	636,000,000	Pendapatan Daerah		0 unit	0		
01.05.1.05.02.060.010				Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Kabupaten	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90 Persen	165,000,000	Pendapatan Daerah		0 Persen	0		

01.05.1.05.02.060.0 13				Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat Pasca Bencana	BURAU, WASUPONDA, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU	Jumlah jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat yang dibangun	1 Unit	0	Pendapatan Daerah	0 Unit	0
1	5	53		Program Kedaruratan dan Logistik		Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender	24%	1,470,324,250			
01.05.1.05.02.053.0 01				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kejadian	219,974,250	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	0
01.05.1.05.02.053.0 02				Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	10 Kejadian	160,590,000	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	0
01.05.1.05.02.053.0 03				Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	5 Kejadian	99,500,000	Pendapatan Daerah	0 Kejadian	0

01.05.1.05.02.053.0 04				Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Kabupaten	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	30 orang	990,260,000	Pendapatan Daerah	0 orang	0
1	5	62		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana	500 Orang	651,783,770			
01.05.1.05.02.062.0 02				Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA, MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	150 Orang	82,150,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
01.05.1.05.02.062.0 03				Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	MANGKUTANA, MALILI, WOTU, KALAENA, WASUPONDA, BURAU, TOWUTI, ANGKONA, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	150 Orang	174,456,770	Pendapatan Daerah	0 Orang	0
01.05.1.05.02.062.0 04				Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	MANGKUTANA, MALILI, KALAENA, WOTU, BURAU, WASUPONDA, ANGKONA, TOWUTI, TOMONI TIMUR, TOMONI, NUHA	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	150 Orang	72,700,000	Pendapatan Daerah	0 Orang	0

01.05.1.05.02.062.0 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	83 Unit	99,812,000	Pendapatan Daerah		0 Unit	0
01.05.1.05.02.062.0 06	Apel Siaga Bencana	Kabupaten	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	2 Kali	35,865,000	Pendapatan Daerah		0 Kali	0
01.05.1.05.02.062.0 07	Simulasi Penanggulangan Bencana	Kabupaten	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 Kali	64,385,000	Pendapatan Daerah		0 Kali	0
01.05.1.05.02.062.0 08	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Kabupaten	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	50 Orang	122,415,000	Pendapatan Daerah		0 Orang	0
TOTAL					4,787,915,670				0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 8 program dan 37 kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 7,120,711,570,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 2,332,795,900,- dan Belanja Langsung Rp 4,787,915,670,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 7

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Non Urusan				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
				2,332,795,900	
	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji & tunjangan aparatur BPBD	21 orang	1,459,479,900	
	Tambahan Penghasilan Lainnya	Terbayarnya tambahan penghasilan aparatur BPBD	21 orang	873,316,000	
	BELANJA LANGSUNG			4,787,915,670	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	825,679,900	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	850 surat	4,200,000	Pendapatan Daerah
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik yang dibayarkan	60 Rekening	78,649,200	Pendapatan Daerah
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan	1 orang	20,800,000	Pendapatan Daerah
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	105 unit	55,450,000	Pendapatan Daerah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	50 jenis	30,000,000	Pendapatan Daerah
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	48,350,000	Pendapatan Daerah
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	17,500,000	Pendapatan Daerah
8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.000 Kotak	20,575,000	Pendapatan Daerah

9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	7,200,000	Pendapatan Daerah
10	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 jenis	19,198,400	Pendapatan Daerah
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	47 Kali	285,780,000	Pendapatan Daerah
12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	5 orang	118,000,000	Pendapatan Daerah
13	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 Dokumen	40,925,000	Pendapatan Daerah
14	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	220 Kali	79,052,300	Pendapatan Daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	340,000,000	
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	100,000,000	Pendapatan Daerah
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	100,000,000	Pendapatan Daerah
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	20,000,000	Pendapatan Daerah
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	15 Unit	120,000,000	Pendapatan Daerah
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	12,000,000	
19	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 Dokumen	6,000,000	Pendapatan Daerah
20	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	3 Dokumen	6,000,000	Pendapatan Daerah
IV	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun tepat waktu	100%	12,500,000	
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 Dokumen	12,500,000	Pendapatan Daerah

V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	60,000,000	
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang-undangan	10 Orang	60,000,000	Pendapatan Daerah
Wajib					
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
VI	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana fisik dan non fisik pasca bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	4 unit	1,415,627,750	
23	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarpras Umum, Harta dan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Jumlah dokumen data hasil identifikasi kondisi kerusakan sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana	1 Dokumen	80,577,750	Pendapatan Daerah
24	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana	Jumlah sarana dan prasarana umum pada daerah tangkapan air dan sungai yang dibangun	2 Unit	534,050,000	Pendapatan Daerah
25	Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong Pasca Bencana	Jumlah turap/talud/bronjong yang direkonstruksi/rehabilitasi	2 unit	636,000,000	Pendapatan Daerah
26	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan Dana Non APBD	Persentase serapan anggaran dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90 Persen	165,000,000	Pendapatan Daerah
VII	Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase kejadian bencana yang terfasilitasi penanganan kedaruratan dan logistiknya yang responsive gender	24%	1,470,324,250	
27	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kejadian	219,974,250	Pendapatan Daerah
28	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	10 Kejadian	160,590,000	Pendapatan Daerah
29	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana	Jumlah kejadian tanggap darurat yang tertangani	5 Kejadian	99,500,000	Pendapatan Daerah
30	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat	Jumlah Tim Reaksi Cepat Laki-laki dan perempuan yang diberdayakan dalam penanggulangan bencana	30 orang	990,260,000	Pendapatan Daerah

VIII	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah masyarakat di daerah beresiko bencana yang memiliki pemahaman tentang pengurangan resiko bencana	500 Orang	651,783,770	
31	Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	150 Orang	82,150,000	Pendapatan Daerah
32	Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	150 Orang	174,456,770	Pendapatan Daerah
33	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi daerah rawan bencana	150 Orang	72,700,000	Pendapatan Daerah
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	83 Unit	99,812,000	Pendapatan Daerah
35	Apel Siaga Bencana	Jumlah apel siaga bencana yang dilaksanakan	2 Kali	35,865,000	Pendapatan Daerah
36	Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 Kali	64,385,000	Pendapatan Daerah
37	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat	Jumlah TRC dan SAR laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan penanggulangan tanggap darurat	50 Orang	122,415,000	Pendapatan Daerah
TOTAL				7,120,711,570	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2020, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, Juni 2019

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004